



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2018 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN  
PENERIMAAN PAJAK UMKM  
(Studi Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh tahun 2016-2020)**

Oleh:

**RIDHO BADAR BABORI**

**1710533038**

**Dosen Pembimbing : Dr. Aries Tanno, SE, M,Si, Ak, CA  
NIP. 196904091994031001**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebahagian dari Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

**Padang**

**2021**



No Alumni  
Universitas :

**Ridho Badar Babori**

No Alumni  
Fakultas :

#### BIODATA

a) Tempat/Tgl Lahir : Simpang Batu Hampar, 27 Mei 1999 b) Nama Orang Tua : Fadhly Busnia dan Yulfia c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Akuntansi e) No BP : 1710533038 f) Tanggal Lulus : 27 Juli 2021 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.69 i) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan j) Alamat Orang Tua : Piladang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM**

**(Studi Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh tahun 2016-  
2020)**

Skripsi Oleh Ridho Badar Babori  
Pembimbing Dr. Aries Tanno, SE, M,Si, Ak, CA

#### ABSTRACT

*This study aims to empirically examine the effect of implementing Government Regulation Number 23 of 2018 on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenues at KPP Pratama Payakumbuh in 2016-2020. The method used in this research is quantitative descriptive method and comparative method. The type of data used in this research is secondary data. Collecting data in this study using documentation techniques. The population in this study is data on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenue data based on Government Regulation Number 46 of 2013 for the period January 2016 to June 2018 and Government Regulation Number 23 of 2018 for the period July 2018 to December 2020 at the Pratama Tax Service Office. Payakumbuh. The sampling technique in this research is non-probability sampling with saturated sampling type. Data analysis was carried out by non-parametric tests using the IBM SPSS Statistics 25 program. The results of this study are Government Regulation Number 23 of 2018 has a significant effect on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenues at the Payakumbuh Pratama Tax Service Office. Future research is recommended to conduct the same research but be carried out at different tax offices, or use several tax offices as research objects so that research results can be generalized, and also use a longer period of time so that the effect of implementing Government Regulation Number 23 of 2018 is clearer visible.*

**Keywords :** *Government Regulation Number 23 of 2018, MSME taxpayers, MSME tax revenues*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak UMKM dan data penerimaan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode januari 2016 s/d juni 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 periode juli 2018 s/d desember 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan jenis sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan uji non parametrik menggunakan program *IBM SPSS Statistics 25*. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat di generalisir, dan juga menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar peparuh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih jelas terlihat.

**Kata Kunci** : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM, penerimaan pajak UMKM

